



LAPORAN KEUANGAN

(AUDITED)

2021

- LO
- LPE
- NERACA
- LRA
- CALK

**BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Biro Tata Pemerintahan menyajikan Laporan Keuangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Secara ringkas Laporan Keuangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

A.	Pendapatan ditetapkan sebesar	Rp	0,00
	realisasinya mencapai sebesar	Rp	<u>0,00</u>
	sehingga kurang dari target sebesar	Rp	0,00
	atau sebesar 100%.		
B.	Belanja ditetapkan sebesar	Rp	14.813.086.071,00
	realisasinya mencapai sebesar	Rp	<u>11.293.249.075,00</u>
	sehingga kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.519.836.996,00)
	atau sebesar 23,76%.		

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2021.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar	Rp.	2.301.092.677,35
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	5.868.000,00
Aset Tetap sebesar	Rp.	865.117.677,35
dan Aset Lainnya sebesar	Rp.	1.430.107.000,00
 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar	 Rp.	 0,00
yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp.	0,00
serta Kewajiban Jangka Panjang sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar	Rp.	2.301.092.677,35

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan-LO terdiri dari :	Rp	0,00
Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	0,00
Pendapatan Transfer - LO	Rp	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp	0,00
Beban, terdiri dari :	Rp	11.475.513.905,74
Beban Operasi	Rp	11.174.750.075,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	300.763.830,74
Surplus/Defisit Operasional	Rp	11.475.513.905,74
Defisit - Laporan Operasional	Rp	(11.475.513.905,74)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp	2.491.908.133,20
Surplus Laporan Operasional	Rp	(11.475.513.905,74)
RK PPKD	Rp	11.296.624.075,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(11.925.625,11)
Ekuitas Akhir	Rp	2.301.092.677,35

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya dalam menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Kepala Biro Tata Pemerintahan

Setda DIY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... v

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..... 1

Laporan Operasional (LO) 2

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 4

Neraca 5

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 6

LAMPIRAN

Rincian LRA..... 28

Rekapitulasi LRA 43

Penjabaran LRA 49

Kertas Kerja SIPKD..... 63

Berita Acara Penutupan Kas..... 82

Register Penutupan Kas 83

Berita Acara Pemeriksaan Kas..... 84

Register Pemeriksaan Kas 85

Rekapitulasi Belanja Barang Pakai Habis 86

Berita Acara Stock Opname Persediaan..... 87

Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap) 89

Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya 91

Kertas Kerja Mutasi Persediaan 93

Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap..... 94

Rekapitulasi Buku Inventaris..... 100



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦑꦺꦥꦠꦶꦲꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai serta isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

selaku Kuasa Pengguna Anggaran



HARLEDI TRI WAHYU NUGROHO S.I.P., M.Si.

NIP. 197410171999031002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
4.01.01.001 - BIRO TATA PEMERINTAHAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uralan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.813.086.071,00	11.293.249.075,00	76,24	5.489.193.158,00
BELANJA OPERASI	14.673.117.071,00	11.162.845.075,00	76,08	5.192.381.158,00
Belanja Pegawai	5.522.056.571,00	5.371.051.965,00	97,27	2.789.172.879,00
Belanja Barang dan Jasa	9.151.060.500,00	5.791.793.110,00	63,29	2.403.208.279,00
Jumlah Belanja Operasi	14.673.117.071,00	11.162.845.075,00	76,08	5.192.381.158,00
BELANJA MODAL	139.969.000,00	130.404.000,00	93,17	296.812.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.969.000,00	130.404.000,00	93,17	209.750.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	87.062.000,00
Jumlah Belanja Modal	139.969.000,00	130.404.000,00	93,17	296.812.000,00
JUMLAH BELANJA	14.813.086.071,00	11.293.249.075,00	76,24	5.489.193.158,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.813.086.071,00)	(11.293.249.075,00)	76,24	(5.489.193.158,00)

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY

ABU EDI TRI WAHYU MUGROHO, S.I.P., M.Si.
19741017 199903 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4.01.01.001 - BIRO TATA PEMERINTAHAN

LAPORAN OPERASIONAL

untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan AsetNon Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN DAERAH				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	5,371,051,965.00	2,789,172,879.00	2,581,879,086.00	92.57
Beban Barang dan Jasa	5,803,698,110.00	2,505,482,859.00	3,298,215,251.00	131.64
Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASI	11,174,750,075.00	5,294,655,738.00	5,880,094,337.00	111.06
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	285,247,510.74	386,434,596.24	(101,187,085.50)	(26.18)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,857,320.00	5,892,990.00	1,964,330.00	33.33
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7,659,000.00	5,744,250.00	1,914,750.00	33.33
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	300,763,830.74	398,071,836.24	(97,308,005.50)	(24.44)
BEBAN TRANSFER				

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN	11,475,513,905.74	5,692,727,574.24	5,782,786,331.50	101.58
SURPLUS/DEFISIT LO	(11,475,513,905.74)	(5,692,727,574.24)	(5,782,786,331.50)	101.58

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Mengetahui,

Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY



HARTEDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.

197410171999031002

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4.01.01. – BIRO TATA PEMERINTAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 DAN 2020

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	2.491.908.133.20	2.694.922.649.24
Surplus/Defisit-LO	(11.475.513.905.74)	(5.692.727.574.24)
RK PPKD	11.296.624.075.00	5.489.193.158.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MEN	(11.925.625.11)	519.900.20
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.301.092.677.35	2.491.908.133.20

Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY



HARIEDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.
 NIP 19741017 199903 1 002

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4.01.01. – BIRO TATA PEMERINTAHAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Halaman 1 dari 1

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	2.301.092.677,35	2.491.908.133,20
ASET LANCAR	5.868.000,00	2.779.000,00
Persediaan	5.868.000,00	2.779.000,00
ASET TETAP	865.117.677,35	1.047.096.508,23
Peralatan dan Mesin	3.700.019.248,75	3.580.109.248,75
Gedung dan Bangunan	392.866.000,00	392.866.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.180.000,00	153.180.000,00
Aset Tetap Lainnya	29.818.350,00	29.818.350,00
Akumulasi Penyusutan	(3.410.765.921,40)	(3.108.877.090,52)
ASET LAINNYA	1.430.107.000,00	1.442.032.624,97
Aset Tidak Berwujud	1.430.107.000,00	1.430.107.000,00
Aset Lain-lain	0	11.925.624,97
JUMLAH ASET	2.301.092.677,35	2.491.908.133,20
EKUITAS	2.301.092.677,35	2.491.908.133,20
EKUITAS	2.301.092.677,35	2.491.908.133,20
Ekuitas	(8.995.531.397,65)	2.491.908.133,20
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.296.624.075,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	2.301.092.677,35	2.491.908.133,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.301.092.677,35	2.491.908.133,20

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



HARTEDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.
NIR. 197410171999031002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦺꦴꦫꦏꦺꦴꦩꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦠꦤꦺꦴꦫꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

1.1. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Transfer
 - 3.1.4 Pembiayaan
 - 3.1.5 Pendapatan-LO
 - 3.1.6 Beban
 - 3.1.7 Aset



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦂꦠꦫꦶꦠꦠꦤꦼꦫꦏꦿ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

3.1.8 Kewajiban

3.1.9 Ekuitas Dana

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦂꦠꦶꦂꦠꦤꦤꦶꦥꦺꦴꦏꦸꦫꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjapro.go.id

Email: rotapem@jogjapro.go.id Kode Pos 55213

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang) (Rp)	(%)
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEPENDUDUKAN DAN PERTANAHAN				
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY				
PENDAPATAN				
Pajak Daerah	-	-	-	-
Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANGSUNG				
Belanja Pegawai	5.522.056.571,00	5.371.051.965,00	151.004.606,00	97,27
BELANJA LANGSUNG				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	49,518,000	44,128,000.00	5,390,000	89.12
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	24,868,000	23,828,000.00	1,040,000	95.82
Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				
Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	24,650,000	20,300,000.00	4,350,000	82.35
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	139,142,000	116,782,000.00	22,360,000	83.93
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	139,142,000	116,782,000.00	22,360,000	83.93
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	236,161,000	202,604,000.00	33,557,000	85.79
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	163,890,000	132,905,000.00	30,985,000	81.09



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦗꦿꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Kependudukan				
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14,754,000	13,104,000.00	1,650,000	88.82
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48,992,000	48,370,000.00	622,000	98.73
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8,525,000	8,225,000.00	300,000	96.48
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	173,900,000	159,484,974.00	14,415,026	91.71
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	115,550,000	101,634,974	13,915,026	87.96
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	58,350,000	57,850,000	500,000	99.14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	364,827,500	265,310,000	99,517,500	72.72
Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	364,827,500	265,310,000	99,517,500	72.72
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,346,963,071	6,566,668,135	780,294,936	89.38
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57,985,750	56,410,750	1,575,000	97.28
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	208,498,000	71,636,952	136,861,048	34.36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,505,000	3,930,000	9,575,000	29.10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,162,000	11,745,000	417,000	96.57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,479,096,571	5,330,492,134	148,604,437	97.29



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦼꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦢꦶꦪꦏꦿꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.idEmail: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144,121,250	136,486,597	7,634,653	94.70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,913,000	2,824,000	89,000	96.94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,395,000	2,264,000	131,000	94.53
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,889,000	1,889,000	-	100.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	409,846,000	284,391,629	125,454,371	69.39
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	166,552,000	111,050,000	55,502,000	66.68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,298,000	6,238,000	60,000	99.05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,021,000	34,340,000	681,000	98.06
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,017,000	5,017,000	-	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,973,000	27,973,000	-	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344,044,000	155,065,270	188,978,730	45.07
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,074,000	63,800,000	274,000	99.57
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55,259,000	51,974,000	3,285,000	94.06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110,070,000	57,195,354	52,874,646	51.96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147,553,500	100,460,449	47,093,051	68.08
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,690,000	51,485,000	1,205,000	97.71
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1,810,168,500	774,249,500	1,035,919,000	42.77
Fasilitasi Penataan Wilayah	151,444,000	148,303,000	3,141,000	97.93
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	166,895,000	129,245,000	37,650,000	77.44



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ကုမ္ပဏီဟုခေါ်ဝေါ်ကြသော

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	393,769,500	317,266,500	76,503,000	80.57
Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1,098,060,000	179,435,000	918,625,000	16.34
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	-	-	-	-
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				-
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	4,692,406,000	3,164,022,635	1,528,383,365	67.43
Pelaksanaan Kelembagaan Asli	4,692,406,000	3,164,022,635	1,528,383,365	67.43
Jumlah	14,813,086,071	11,293,249,244	3,519,836,827	76.24

2.1. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pendapatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 100%. Belanja dianggarkan sebesar Rp 14.813.086.071 dan realisasi sebesar Rp 11.293.249.244 atau 76,24%.

Secara umum target kinerja dan keuangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dapat dicapai dengan baik. Sementara itu, pada realisasi keuangan terdapat efisiensi di beberapa pos belanja karena sudah mencukupi kebutuhan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.2 Belanja

Belanja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 14.813.086.071 dan realisasi sebesar Rp 11.293.249.075 atau 76,24%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

	2021	2020 (Audited)
3.1.2.1 Belanja Operasi	Rp 11.162.845.075,00	Rp 5.757.731.561,00

Belanja Operasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 14.673.117.071,00 dan realisasi sebesar Rp 11.162.845.075,00 atau 76,08% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Rp 5.371.051.965,00	Rp 4.098.888.671,00

Belanja Pegawai Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 5.522.056.571,00 dan realisasi Rp 5.371.051.965,00 atau 97,27%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,930,828,812.00	2,782,552,928.00	94.94
	Belanja Gaji Pokok ASN	2,315,379,801.00	2,229,748,240.00	96.30
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	218,159,413.00	205,982,766.00	94.42
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159,390,000.00	158,075,000.00	99.17
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	47,880,000.00	-	-
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	69,175,000.00	69,175,000.00	100.00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	114,133,920.00	113,192,460.00	99.18
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,679,644.00	6,350,478.00	95.07
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31,034.00	28,984.00	93.39
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,548,267,759.00	2,547,939,037.00	99.99
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2,548,267,759.00	2,547,939,037.00	99.99
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42,960,000.00	40,560,000.00	94.41
3	Belanja Honorarium	31,560,000.00	29,160,000.00	92.40
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31,560,000.00	29,160,000.00	92.40
4	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00
	Belanja Pegawai	5,522,056,571.00	5,371,051,965.00	97.27



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ရတနာတော်

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

	2021	2020 (Audited)
3.1.2.1.2 <u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>Rp5.791.793.110,00</u>	<u>Rp 2.848.778.000,00</u>

Belanja Barang dan Jasa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 9.151.060.500,00 dan realisasi sebesar Rp 5.791.793.110,00 atau 63,29%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,838,357,500.00	1,766,901,250.00	62.25
2	Belanja Jasa Kantor	2,971,220,250.00	2,005,052,200.00	67.48
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	264,920,000.00	201,445,000.00	76.04
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	780,300,000.00	395,500,000.00	50.69
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	230,683,050.00	229,348,300.00	99.42
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	529,310,700.00	524,710,600.00	99.13
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136,620,000.00	125,495,949.00	91.86
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,387,649,000.00	531,339,811.00	38.29
Jumlah		9,151,060,500.00	5,791,793,110.00	63.29

	2021	2020 (Audited)
3.1.2.2 <u>Belanja Modal</u>	<u>Rp 130.404.000,00</u>	<u>Rp 321.400.000,00</u>

Belanja Modal Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 139.969.000,00 dan realisasi sebesar Rp 130.404.000,00 atau 93,17%, dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.2.2.2 <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	<u>Rp 130.404.000,00</u>	<u>Rp 209.750.000,00</u>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp139.969.000,00 dan realisasi sebesar Rp130.404.000,00 atau 93,17%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-
2	Belanja Modal Alat-Alat Studio	21,641,000.00	20,580,000.00	95.10



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦼꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦢꦶꦲꦶꦴꦏꦿꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.idEmail: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	21,000,000.00	14,994,000.00	71.40
5	Belanja Modal Komputer	97,328,000.00	94,830,000.00	97.43
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah		139,969,000.00	130,404,000.00	93.17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp115.410.000,00; dicatat sebagai Beban Habis Pakai untuk kebijakan strategis (penanganan covid-19) sebesar Rp14.994.000,00; dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0.00.

3.1.6 Beban

	2021	2020 (Audited)
3.1.6 Beban	<u>Rp11.475.513.905,74</u>	<u>Rp5.692.727.574,24</u>

Realisasi Beban Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.475.513.905,74 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.6.1 Beban Operasi	<u>Rp 11.174.750.075.00</u>	<u>Rp 5.692.727.574.24</u>

Realisasi Beban Operasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.174.750.075,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp2.789.172.879.00. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp5.803.698.110,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp300.763.830,74. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.6.1.1 Beban Pegawai	<u>Rp 2.789.172.879.00</u>	<u>Rp 2.789.172.879.00</u>

Realisasi Beban Pegawai Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.371.051.965.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Gaji dan Tunjangan	2,782,552,928.00
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2,229,748,240.00
	Tunjangan Keluarga	205,982,766.00
	Tunjangan Jabatan	158,075,000.00
	Tunjangan Fungsional	0
	Tunjangan Fungsional Umum	69,175,000.00
	Tunjangan Beras	113,192,460.00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤꦸꦫꦺꦴꦗꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6,350,478.00
Pembulatan Gaji	28,984.00
Jumlah	2,782,552,982.00
2 Beban Tambahan Penghasilan PNS	2,508,939,656.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kinerja PNS	2,508,939,656.00
Jumlah	2,508,939,656.00
3 Honorarium PNS	40,560,000.00
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29,160,000.00
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11,400,000.00
Jumlah	40,560,000.00
4 Honorarium Non PNS	38,999,381.00
Beban Gaji Pokok PPPK	38,999,381.00
Jumlah	38,999,381.00
Jumlah Beban Pegawai	5.371.051.965.00

Realisasi Beban Barang dan Jasa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.803.698,110,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Bahan Pakai Habis	1,778,806,250.00
2	Beban Jasa Kantor	2,005,052,200.00
3	Beban Sewa Tanah	0
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	201,445,000.00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	395,500,000.00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	12,000,000.00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	229,348,300.00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	524,710,600.00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-
10	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,495,949.00
11	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	531,339,811.00
	Jumlah	5.803.698,110,00

	2021	2020 (Audited)
3.1.6.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>Rp300.763.830,24</u>	<u>Rp398.071.836,24</u>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp300.763.830,74 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	285,247,510.74



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦂꦠꦶꦂꦠꦤꦼꦢꦫꦺꦴꦏꦏꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprovo.go.id

Email: rotapem@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,857,320.00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,659,000.00
Jumlah		300.763.830,74

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar (Rp11.475.513.905,74) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dikurangi Beban sebesar Rp11.475.513.905,74.

3.1.7 Aset

Aset Biro Tata Pemerintahan Setda DIY per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.301.092.677,35 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.868.000,00 Aset Tetap sebesar Rp865.117.677,35 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.430.107.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.7.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp5.868.000,00</u>	<u>Rp2.779.000,00</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.868.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.7.1.5 <u>Persediaan</u>	<u>Rp5.868.000,00</u>	<u>Rp2.779.000,00</u>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.868.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020 (Audited)
1.	Bahan Bakar dan Pelumas	2,550,000.00	700,000.00
2.	Alat Tulis Kantor	19,000.00	1,160,000.00
3.	Kertas dan Cover	1,279,000.00	0
4.	Benda Pos	1,070,000.00	225,000.00
5.	Perabot Kantor	510,000.00	468,000.00
6.	Alat Listrik	440,000.00	226,000.00
Jumlah		5,868,000.00	2,779,000.00

	2021	2020 (Audited)
3.1.7.2 <u>Aset Tetap</u>	<u>Rp865.117.677,35</u>	<u>Rp 1.047.096.508,23</u>

Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp865.117.677,35 dengan rincian sebagai berikut:



SEKRETARIAT DAERAH

ကုမ္ပဏီဟာ နိမိတ်မရှိဘဲ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Email: rotapem@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

	2021	2020 (Audited)
3.1.7.2.2 <u>Peralatan dan Mesin</u>	<u>Rp 3.700.019.248,75</u>	<u>Rp 3.580.109.248,75</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.700.019.248,75 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp130.404.000,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2021.
- b. Mutasi kurang
Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00.
- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp 3.700.019.248,75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020 (Audited)
	Peralatan dan Mesin	3,700,019,248.75	3,580,109,248.75
1	Alat Besar	17,100,000.00	17,100,000.00
2	Alat Angkutan	1,073,908,300.00	1,073,908,300.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	52,424,400.00	52,424,400.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	896,695,180.00	896,695,180.00
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	127,344,500.00	106,764,500.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4,500,000.00	-
7	Alat Laboratorium	41,150,000.00	41,150,000.00
8	Komputer	1,486,896,868.75	1,392,066,868.75
	Jumlah	3,700,019,248.75	3,580,109,248.75

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021	2020 (Audited)
Gedung dan Bangunan	392,866,000.00	392,866,000.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	392,866,000.00	392,866,000.00
Jumlah	392,866,000.00	392,866,000.00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 153.180.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

Tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan aset jalan, irigasi, dan jaringan.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp. 153.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1.	Jaringan Telepon di atas tanah	147,180,000.00	147,180,000.00
2.	Jaringan Telepon di bawah tanah	6,000,000.00	6,000,000.00
	Jumlah	153,180,000.00	153,180,000.00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.818.350,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2021 sebesar Rp0,00 kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00 penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp29.818.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020 (Audited)
Aset Tetap Lainnya			
1	Buku Umum	2,037,100.00	2,037,100.00
2	Buku Filsafat	282,400.00	282,400.00
3	Buku Agama	179,800.00	179,800.00
4	Buku Ilmu Sosial	19,726,906.00	19,726,906.00
5	Buku Ilmu Bahasa	3,479,672.00	3,479,672.00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	41,600.00	41,600.00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3,171,268.00	3,171,268.00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	53,000.00	53,000.00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	846,604.00	846,604.00
	Jumlah	29,818,350.00	29.818.350,00

		2021	2020(Audited)
3.1.7.2.7	Akumulasi Penyusutan	(3.410.765.921,40)	(3.108.877.090,52)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (3.410.765.921,40) rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.074.172.001,40)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(243.576.920,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(93.017.000,00)
	Jumlah	(3.410.765.921,40)

	2021	2020(Audited)
3.1.7.3 <u>Aset Lainnya</u>	Rp1.430.107.000,00	Rp1.442.032.624,97

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.442.032.624,97 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
<u>Aset Tak Berwujud</u>	<u>Rp1.430.107.000,00</u>	<u>Rp1.430.107.000,00</u>
<u>Aset Lain-Lain</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp11.925.624,97</u>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.430.107.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah ATB sebesar Rp0,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang ATB sebesar Rp00,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 ke beban pemeliharaan software, penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo ATB per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.430.107.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp1.430.107.000,00
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00
	Jumlah	Rp1.430.107.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.430.107.000,00 tersebut meliputi software sebesar Rp512.350.000,00 dan Kajian sebesar Rp 917.757.000,00

		2021	2020 (Audited)
3.1.7.3.2	Aset Lain-lain	Rp0,00	Rp11.925.624,97



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦗꦿꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp11.925.624,97 terdiri dari penghapusan aset rusak berat senilai Rp 80.140.131,25 yang memiliki akumulasi penyusutan sebesar Rp 68.214.506,28.

3.1.8 Kewajiban

	2021	2020 (Audited)
3.1.8 <u>Kewajiban</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020 (Audited)
3.1.8.1 <u>Kewajiban Jangka Pendek</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00

	2021	2020 (Audited)
3.1.8.1.3 <u>Utang Belanja</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2021 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Pegawai	-
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-
3.	Utang Belanja Modal	-
	Jumlah	-

3.1.9 Ekuitas

	2021	2020 (Audited)
3.1.9.1 <u>Ekuitas</u>	<u>Rp2.301.092.677,35</u>	<u>Rp2.491.908.133,20</u>

Saldo Ekuitas sebesar Rp2.301.092.677,35 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Uraian	Jumlah
Ekuitas awal	2.491.908.133,20
Surplus Defisit – LO	(11.475.513.905,74)
Ekuitas Dikonsolidasikan:	
RK PPKD	11.296.624.075,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(11.925.625,11)
Jumlah	2.301.092.677,35

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan program dan kegiatannya sesuai tugas dan fungsi yang diemban dengan berdasar kepada:

1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY merupakan sebuah biro (bukan badan/dinas) yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas (untuk skala biro) sebagai penyedia bahan rumusan kebijakan untuk Pimpinan, yaitu meliputi:

1. Peningkatan kerjasama antar daerah guna mengurangi konflik antar daerah, mengatasi penguasaan sumber daya alam dan aset ekonomi daerah;
2. Optimalisasi forum-forum kerjasama antar daerah;
3. Peningkatan kualitas penataan administrasi penduduk ber-KTP guna menunjang tertib administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas penataan administrasi akta kelahiran dan akta perkawinan guna menunjang tertib administrasi kependudukan;
5. Pembangunan database kependudukan skala provinsi;
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan sara serta prasarananya;
7. Peningkatan kualitas kebijakan yang akuntabel, responsif dan partisipatif;
8. Peningkatan koordinasi penataan daerah otonomi.

Semua cakupan tersebut dikelola oleh 4 (empat) bagian yaitu Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, Bagian Kependudukan dan Bagian Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pada tahun anggaran 2021 ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengelola dana untuk program dan kegiatan dari APBD murni, Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus. Pertambahan aset tahun 2021 terjadi dari belanja/pengadaan barang dan jasa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Sedangkan pengurangan aset disebabkan oleh usulan penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai.

Laporan keuangan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Laporan keuangan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ကုသကုဗဟိုဝိဇ္ဇာဗဟိုဇကု

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



**BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY
2021**